

KAJIAN KOMPETENSI SDM GURU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN PONOROGO*

*Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA Kabupaten Ponorogo dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2010

Sulton, Sumaji, Rudianto

Dosen Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email : sulton@umpo.ac.id

ABSTRAK

Program sertifikasi guru merupakan upaya peningkatan kesejahteraan guru republik Indonesia yang digulirkan pemerintah beberapa tahun yang lalu dan tahun 2014 diharapkan telah selesai dilaksanakan secara nasional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun apakah hal itu benar-benar berdampak positif terhadap kualitas pendidikan di Ponorogo, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang kompetensi SDM guru dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Ponorogo. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi SDM guru dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Ponorogo.

Lokasi penelitian di Kabupaten Ponorogo dengan obyek utamana adalah guru-guru tersertifikasi dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Sumber data diperoleh dari kepala sekolah, pengawas, stakeholders, wali murid, guru, dan tokoh yang dianggap mengerti tentang masalah ini. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis domain, taksonomi, komponensial, dan tema. Keabsahan data dilakukan melalui model triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Rata-rata kompetensi (personal, pedagogik, profesional, sosial) guru tersertifikasi dapat dikategorikan baik untuk sekolah unggulan. Sedangkan sekolah non unggulan kategorinya cukup. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor SDM guru, manajemen dukungan sekolah, ketersediaan sarana-prasarana pembelajaran di sekolah; Sertifikasi guru tidak secara otomatis dan instan dapat meningkatkan mutu lulusan. Akan tetapi melalui proses pembelajaran yang baik diyakini akan dapat meningkatkan mutu lulusan.

Upaya pemerintah terkait peningkatan kompetensi guru tersertifikasi belum terencana dengan baik, karena yang ada baru dalam bentuk penguatan kewajiban administrasi guru. Monitoring atas guru tersertifikasi belum berjalan efektif dan optimal. Dukungan sekolah & stakeholder terhadap optimalisasi guru tersertifikasi secara umum belum maksimal. Motivasi guru tersertifikasi bentuknya bersifat eksternal dan belum menjadi kesadaran pribadi.

Kata Kunci : SDM Guru, Kualitas Pendidikan.

LATAR BELAKANG MASALAH

Pengalaman banyak negara tetangga yang lebih maju dari Indonesia, menunjukkan bahwa pencapaian produktivitas masyarakat suatu bangsa ditentukan oleh peningkatan standart hidup melalui perbaikan kualitas pendidikan. Kuncinya adalah memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas guru. Di Amerika Serikat,

melalui *Public Law 107-110 (No. Child Left Behind Act)*, pada tahun 2005-2006 dirumuskan kebijakan bahwa semua anak di setiap sekolah Amerika Serikat harus diajar oleh guru yang berkualitas. Di Australia, melalui *Competency Framework For Teachers*, disepakati urgensi kebijakan peningkatan kompetensi guru sebagai pintu utama peningkatan kualitas pendidikan.

Belajar dari pengalaman beberapa negara dimaksud, melalui rangkaian peraturan perundangan mulai UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, PP Standar Nasional Pendidikan diletakkan pondasi bagi peningkatan kompetensi guru sebagai faktor kunci bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut mengamanatkan sedikitnya atas dua hal yaitu: (1) penyelesaian masalah mutu guru melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi; (2) seluruh guru memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan minimal dan memiliki sertifikasi pendidik profesional. Keputusan politik tersebut menempatkan guru sebagai faktor penting sekaligus strategis dalam konstruksi kualitas pendidikan di Indonesia. Sejumlah penelitian yang dihimpun Tim Pengembang Program BERMUTU menemukan kesimpulan yang hampir sama, bahwa guru adalah kunci bagi keberhasilan pendidikan anak di sekolah (Project Operational Manual Program BERMUTU, Depdiknas, 2007).

Tindak lanjutnya, sejak akhir bulan Oktober 2007, pemerintah melaksanakan Program Sertifikasi Guru, untuk memberikan penghargaan kepada guru sebagai pendidik profesional. Penyelenggaraan pendidikan berkualitas memang memerlukan kerja keras dan kesungguhan dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, penyelenggara pendidikan, pengelola pendidikan maupun stakeholders lainnya termasuk didalamnya keberadaan guru. Guru bukan saja menjadi faktor penting dan strategis bagi peningkatan kualitas pendidikan, sejumlah kebijakan dan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya menegaskan, betapa keberadaan guru menjadi kunci bagi keberhasilan pendidikan anak-anak di sekolah. Karena itu paradigma, sikap, tindakan dan kebiasaan guru dalam mengelola pembelajaran adalah hal mendasar yang penting untuk diperhatikan. Merubah cara berpikir, bersikap, bertindak dan kebiasaan guru dalam mengelola pembelajaran yang telah berlangsung lama bukanlah masalah yang

mudah, namun bukan berarti tidak bisa dilakukan.

Karena itulah menarik untuk dikaji, apakah Program Sertifikasi Guru yang telah diikuti oleh para guru di Kabupaten Ponorogo mampu meningkatkan kompetensinya untuk menjadi pendidik profesional? Pertanyaan yang sama seringkali dilontarkan stakeholders pendidikan lainnya, karena fenomena perubahan menuju pendidik profesional sebagaimana maksud diadakannya sertifikasi guru belum juga nampak ditunjukkan oleh para guru. Bagaimana sebenarnya upaya yang dilakukan pemerintah serta stakeholders pendidikan lainnya dalam mendorong perubahan tersebut? Inilah beberapa hal mendasar yang akan dikaji dari penelitian ini.

RUMUSAN MASALAH, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka setidaknya dapat dirumuskan tiga masalah yang akan menjadi fokus dari penelitian ini diantaranya adalah: 1) Bagaimana potret kompetensi SDM guru bersertifikasi pendidik di kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi guru bersertifikasi pendidik di Ponorogo? 3) Bagaimana dukungan satuan pendidikan dan stakeholders dalam meningkatkan kompetensi guru bersertifikasi pendidik di Kabupaten Ponorogo? Berangkat dari tiga rumusan masalah itulah tujuan penelitian ini hendak dicapai.

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada guru bersertifikat pendidik profesional baik PNS maupun non PNS di seluruh jenjang sekolah baik negeri maupun swasta serta upaya pemerintah dan stakeholders lainnya dalam mendorong para guru pemilik sertifikat pendidik menjadi guru profesional.

KERANGKA TEORITIK

Departemen Pendidikan Nasional menegaskan, dalam konteks pendidikan

paradigma mutu mencakup *input*, proses, dan *output* pendidikan (Depdiknas, 2001). Artinya tinggi rendahnya mutu *input*, proses dan *output* dapat diukur dari tingkat kesiapan ketiganya, makin tinggi kesiapan *input*, proses dan *output*, makin tinggi pula mutu *input*, proses dan *output* tersebut. Dengan demikian, mutu pendidikan yang dimaksud pada dasarnya menyangkut keseluruhan proses bagaimana jasa pendidikan itu dikelola mulai dari *input*, proses, dan *output* pendidikan di sekolah (Depdiknas, 2001).

Untuk mengukur mutu pendidikan di sekolah, berdasar PP No. 28/1990 dan SK Mendiknas No. 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan, menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan di sekolah ditentukan oleh empat komponen, yaitu: 1) kegiatan dan kemajuan belajar siswa; 2) pelaksanaan kurikulum; 3) guru dan tenaga kependidikan lainnya; dan 4) kinerja satuan pendidikan sebagai satu keseluruhan. Dalam hal ini, terutama melalui implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran, guru merupakan figure yang mempertemukan konsepsi tujuan pembelajaran dengan konsepsi siswa. Oleh karena itu secara psikologis, pikiran, perencanaan dan keputusan yang dibuat oleh guru merupakan bagian penting dalam konteks pembelajaran (Clark & Peterson, 1986). Guru merupakan entitas yang memiliki kekuatan untuk menentukan perubahan termasuk didalamnya peningkatan mutu pembelajaran. Inilah asumsi fundamental yang mendasari pengembangan profesionalitas guru melalui penguatan kompetensinya sekaligus penilaian kinerja guru.

Menurut Lefrancois (1995:5), kompetensi merupakan kapasitas untuk melakukan sesuatu, yang dihasilkan dari proses belajar. Cowell (Dalam Depdikbud, 1988:95-99), mengartikan kompetensi sebagai suatu keterampilan/kemahiran yang bersifat aktif. Kompetensi dengan demikian merupakan satu kesatuan utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap

yang dinilai, yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 dinyatakan bahwa: Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/ atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan pengelolaan peserta didik, meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum/silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Zid, 2008:6). Kompetensi kepribadian adalah kapasitas kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, mejadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara berkelanjutan (Zid, 2008:6). Kompetensi profesional adalah kemampuan memahami tugas-tugas serta hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas tersebut serta lebih mendalam. Orang yang profesional tidak hanya mampu melaksanakan tugas pokoknya, namun juga mampu melaksanakan hal-hal yang terkait dengan keberhasilan tugas pokok tersebut (P. Sondang Siagian, 1997). Kompetensi sosial diartikan sebagai kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat

untuk mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan, menggunakan kronologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/ wali peserta didik dan bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar (Zid, 2008:6).

Berdasarkan uraian tersebut kompetensi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan yang dimaksud adalah seperangkat karakteristik umum dari kinerja seseorang guru (sebagai aktualisasi dari kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial) yang terintegrasi dalam bentuk pelaksanaan prosedur pembelajaran dan menyajikan bahan ajar yang bersifat mendasar serta umum. Indikator dari kompetensi mengelola pembelajaran tersebut meliputi kompetensi dalam mendemonstrasikan: (1) memulai pelajaran; (2) mengelola kegiatan belajar dan pembelajaran termasuk; (3) mengorganisasikan waktu, siswa dan fasilitas belajar; (4) melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar; serta (5) menutup pelajaran.

Pada penelitian ini, 4 komponen kompetensi tersebut akan dilihat secara terintegrasi meskipun lebih banyak difokuskan tugas-tugas utama guru dalam pembelajaran yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus kajiannya pada kompetensi guru di Ponorogo, terutama hendak mendiskripsikan kondisi guru dan kompetensinya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jenis Penelitian. Sebagai penelitian fenomenologis, penelitian ini mendasarkan pada kondisi lapangan, tanpa diletakkan asumsi-asumsi/dugaan-dugaan tentang permasalahan yang diteliti (Lexy J. Moleong:1994:9). Dengan demikian hasil penelitian ini, benar-benar merupakan keadaan nyata kondisi dan kompetensi guru yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Sampel data penelitian ini ditetapkan melalui proses siklus (*snowbole sample*) dari obyek penelitian tertentu menuju obyek penelitian lainnya sesuai dengan karakter dan kondisi guru, wilayah, dan status sekolah. Sumber data diperoleh melalui pengamatan atas implementasi kompetensi dan dokumentasi atas kinerja guru, meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Di samping itu dipadukan juga dengan catatan-catatan hasil wawancara mendalam yang digali dari informan maupun subyek penelitian. Satuan kajian dalam penelitian ini adalah kompetensi guru SD/ MI, SMP/ MTs., SMA/ MA di Ponorogo.

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kompetensi guru di sekolah, meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, social, dan profesional, serta mutu lulusan. Sebagai kajian kebijakan yang bersifat eksplanatoris, maka penelitian ini berusaha mengungkap pelaksanaan kebijakan dan kemudian memberikan penilaian atas pelaksanaan kebijakan tersebut berdasarkan ketentuan kebijakan (Mayer & Greenwood, 1984:57). Artinya penelitian ini menggunakan latar studi alamiah tanpa intervensi dari pengkaji dan berusaha memberi arti atau menafsirkan gejala yang dialami oleh mereka yang terlibat.

Dalam setiap sekolah dideskripsikan gejala nyata yang ada di lapangan dan bersifat kualitatif, tanpa adanya intervensi dari peneliti. Pendekatan studi kasus dalam pengkajian ini menggunakan data empirik, dimana obyek yang diselidiki adalah suatu gejala yang terjadi di saat ini dalam konteks kehidupan nyata. Menurut Yin Case (1984:23) dalam studi kasus batas-batas antara gejala dan konteks sama sekali tidak jelas karena peneliti tidak memanipulasi atau mengendalikan data, dan karena banyak sumber bukti yang dipergunakan.

Subyek pengkajian ini adalah sejumlah satuan pendidikan dasar SD/ MI, SLTP/ MTs, SMA/ MA yang dipilih secara purposif, yakni satuan pendidikan yang dilaporkan telah berupaya atau diupayakan kegiatan peningkatan kompetensi guru dalam rangka pembaharuan proses belajar-pembelajaran. Pengkajian ini dilakukan di

25 sekolah, yang terdiri atas 15 Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah dan 5 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan 5 Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah di Kabupaten Ponorogo.

Dari tiap satuan pendidikan dikumpulkan data melalui kuesioner, wawancara, observasi kegiatan pembelajaran, analisis isi rancangan pembelajaran, observasi lingkungan, dan analisis RIPS. Kuesioner diisi oleh Kepala Sekolah/ Madrasah dan enam orang guru dalam satu sekolah. Wawancara dilakukan dengan Kepala Sekolah/ Madrasah dan dua dari enam orang guru yang diobservasi kegiatan pembelajarannya. Observasi proses pembelajaran dan lingkungan kelas serta sekolah dilakukan dengan instrumen khusus. Kompetensi pedagogik dan profesional guru, masing-masing dijabarkan dalam beberapa indikator. Dalam format kuesioner, tiap indikator diberi skor dengan rentangan antara 1 s/d 5. Skor 1 menunjukkan bahwa indikator kompetensi yang bersangkutan belum dikuasai dan dilaksanakan, sedang skor 5 menunjukkan bahwa indikator yang bersangkutan telah dihayati dan selalu dilaksanakan.

Proses penelitian ini berbentuk siklus yang dibagi menjadi tiga tahapan yaitu: Tahap pra lapangan atau persiapan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 1) Mengamati data lapangan yang dengan: a) analisis domain; b) analisis taksonomi; c) analisis komponensial; dan d) analisis tema; 2) merumuskan hipotesis sementara yang kemudian akan menjadi focus dalam analisis berikutnya; 3) menganalisis berdasarkan hipotesis; 4) pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data. Untuk tahap pengecekan hasil temuan penelitian dengan cara melakukan *member check* sebagaimana ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (Sanapiah Faisal, 1990:157). Tahap ini dimaksudkan untuk *cross check* data guna mendapatkan kesimpulan secara menyeluruh pada setiap site yang ditetapkan; dan 5) membuat laporan analisa.

HASIL PENELITIAN

Kompetensi Guru Bersertifikasi

Kajian kompetensi guru dalam studi ini, ditujukan untuk mendeskripsikan penguasaan kompetensi guru meliputi empat kompetensi dasar yaitu : kompetensi personal dengan 14 indikator, kompetensi profesional dengan 29 indikator, kompetensi pedagogik dengan 28 indikator, dan kompetensi sosial dengan 9 indikator. Hasil analisis data yang ada diketahui adanya perbedaan kompetensi diantara para guru di Ponorogo karena faktor manajemen masing-masing sekolah. Para guru yang bertugas pada sekolah unggulan memiliki kompetensi yang lebih baik dibanding guru-guru di sekolah konvensional. Secara detail gambaran perbedaan kompetensi tersebut dapat disimak dari temuan berikut :

Pertama, kompetensi personal. Para guru pada sekolah unggulan mencapai rerata 3,3 (baik) dibanding para guru pada sekolah konvensional dengan rerata 2,8 (cukup). Indikatornya meliputi: (1) pemahaman terhadap visi, misi, dan tujuan sekolah; (2) ketaatan terhadap sistem dan aturan sekolah; (3) konsistensi dalam bersikap dan bertindak; (4) karakter; (5) keteladanan; (6) penerapan kode etik; (7) komitmen tugas dan tanggungjawab; (8) etos kerja; (9) keaktifan dan kreativitas; (10) pengembangan diri; (11) penilaian kinerja pribadi; (12) upaya tindak lanjut.

Kedua, kompetensi paedagogik. Guru-guru pada sekolah unggulan memperoleh nilai rerata 3,1 (baik) dan nilai rerata 2,4 (cukup) para guru dari sekolah konvensional. Artinya para guru pada sekolah unggulan memiliki kemampuan mendidik yang lebih baik dibandingkan dengan para guru dari sekolah konvensional. Beberapa faktor yang turut mempengaruhi antara lain : manajemen sekolah, kompetensi kepala sekolah, manajemen SDM, status guru, terbatasnya sumber daya dan sumber dana, dan masih banyak faktor-faktor lain.

Ketiga, kompetensi profesional. Guru-guru di sekolah unggulan

memperoleh score rerata 2,9 (cukup) dan 2,2 (cukup) untuk guru sekolah konvensional. Artinya para guru di Kabupaten Ponorogo baik dari sekolah unggulan maupun sekolah konvensional kompetensi profesionalnya tidak jauh dari kategori cukup. Faktor yang mempengaruhi antara lain: sarana prasarana di sekolah, status guru, tidak adanya fasilitas pendukung di rumah, mindset dan kebiasaan guru, kompetensi SDM, dan factor-faktor lain yang kurang memenuhi standar.

Keempat, kompetensi sosial. Untuk kompetensi sosial dari para guru baik dari sekolah unggulan maupun konvensional diperoleh kategori yang sama yaitu cukup, dengan score 2,8 dari sekolah unggulan dan 2,2 untuk sekolah konvensional. Beberapa faktor yang berpengaruh dalam hal ini adalah soal iklim dan interaksi sosial di sekolah sekaligus lingkungan dan tata budaya serta pergaulan di masyarakat pada umumnya.

Guru Bersertifikasi dan Mutu Lulusan

Mutu lulusan sesungguhnya tidak hanya ditentukan dari hasil ujian nasional semata, melainkan ditentukan juga oleh faktor lainnya seperti : input, proses, dan output, sebagaimana ditegaskan sumber penelitian ini bahwa “mutu pembelajaran harus diawali dengan proses yang baik. Dengan proses yang baik, saya yakin akan menghasilkan luaran yang bermutu”. Lebih lanjut dijelaskan kaitan sertifikasi guru dan peningkatan mutu lulusan bersifat tidak langsung. Paradigma baru sebagai pendidik profesional, sedikitnya telah difahami guru bersertifikasi, meskipun tidak serta merta mampu merubah mindset guru yang tertanam dalam kebiasaan sehari-hari (sumber: Tri Setyo Meseno, 27 Juli 2010). Yang pasti, setiap guru bersertifikasi wajib menyusun persiapan pembelajaran dengan lebih lengkap dan baik, wajib mengajar minimal 24 jam/minggu, dimonitor dan dievaluasi pengawas, serta adanya penilaian kinerja. Semua itu secara tidak langsung diharapkan memberikan pengaruh terhadap peningkatan mutu lulusan siswa. Sementara itu sumber penelitian ini juga menegaskan bahwa mutu lulusan tidak hanya ditentukan

oleh guru, tetapi juga oleh beberapa faktor lain seperti : (1) input siswa, (2) proses, (3) sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai (sumber: Bandi, tanggal 29 Juli 2010). Sumber lainnya juga menegaskan bahwa faktornya antara lain : (1) input siswa, (2) proses yang dilakukan, (3) monitor dan evaluasi (Tri Setyo Miseno, wawancara 26 Juli 2010).

Upaya Pemerintah dan Peningkatan Kompetensi Guru

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi guru bersertifikasi dilakukan melalui beberapa cara seperti : supervisi kepala sekolah, supervisi dan pembinaan pengawas, dan MGMP dan KKG (Sur, Tri, Rus, 26 dan 27 Juli 2010). Beberapa usaha lainnya seperti : (1) program pengembangan potensi; (2) program peningkatan kemampuan guru melalui pelatihan, lokakarya, seminar, workshop dan lainnya; (3) melengkapi sarpras termasuk teknologi informasi; (4) memberikan rewards bagi guru berprestasi; (5) meningkatkan kesejahteraan guru; (6) mengadakan pertemuan secara berkelanjutan sebagai sarana berbagai pengetahuan dalam hal peningkatan mutu; (7) melakukan studi banding; (8) melakukan studi pustaka; (9) melakukan magang ke sekolah lain; (10) mengundang pakar, praktisi, atau birokrasi, (11) PTK untuk memperbaiki pembelajaran di kelas; dan (12) studi lanjut. (Tri, Sur, Maskur, Mus, 28 Juli 2010).

Dukungan Sekolah dan Stakeholders dan Kompetensi Guru

Menurut sumber penelitian ini bahwa sekolah terus berupaya untuk mendorong para guru bersertifikasi meningkatkan kompetensinya melalui beberapa cara, seperti : (Tri Setyo Miseno, 26 Juli 2010). *Pertama*, upaya sekolah dilakukan melalui beberapa cara seperti: (1) mengirim guru mengikuti pelatihan, penataran, lokakarya, workshop, seminar; (2) sosialisasi hasil pelatihan dan berbagai kebijakan pemerintah; (3) pelatihan komputer dan bahasa Inggris; (4) fasilitasi studi lanjut; (5) studi banding ke sekolah lebih maju;

(6) pengiriman untuk magang ke sekolah lain; (7) melengkapi sarana dan media pembelajaran; (8) penghargaan bagi guru berprestasi; (9) kesejahteraan guru; (10) keteladanan dan motivasi dari kepala sekolah. *Kedua*, upaya masyarakat, yang diwadai dalam komite sekolah maupun paguyuban kelas berupa penggalangan dana untuk kelancaran proses pembelajaran; seperti pengadaan gedung, peralatan sekolah, dan dukungan untuk pengembangan guru melalui kegiatan pelatihan guru, seminar, lokakarya, dan membantu guru yang melanjutkan studi. *Ketiga*, peran MGMP dan KKG sebagai wadah guru untuk bekerjasama mengatasi berbagai kesulitan dan meningkatkan kompetensi. *Keempat*, upaya pemerintah daerah dan pusat, antara lain berupa bantuan dana, beasiswa studi lanjut bagi guru, peralatan dan media pembelajaran, serta berbagai kegiatan pembinaan, pelatihan, penataran, dan workshop. (Tri Setyo Miseno, wawancara, 27 Juli 2010).

Evaluasi Pemerintah Terhadap Kompetensi Guru bersertifikasi

Secara terprogram evaluasi atas guru bersertifikasi dilakukan oleh pemerintah seperti : monev secara berjenjang sejak tingkat pusat sampai sekolah atas kinerja guru bersertifikasi, pengawasan dan pembinaan langsung atas kinerja guru oleh kepala sekolah dan para pengawas. (Tri, wawancara 27 Juli 2010). Secara teknis pengawas memonitor kinerja guru, menyangkut kehadiran, perangkat pembelajaran, termasuk metodologi pembelajaran yang tertera dalam tulisan RPP, dan perlengkapan pembelajaran lainnya. (Tri, wawancara 26 Juli 2010). Pelaksanaan pengawasan memang belum optimal, banyaknya pengawas yang tidak faham atas program/agenda yang sedang diawasi. Bagaimana dapat melakukan kontrol dengan baik kepada guru-guru bersertifikasi, jika pengawas tidak faham substansi guru profesional. Sementara itu pemberian sertifikasi guru secara massal dan “digebyah uyah” merupakan sumber kesulitan tersendiri untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Apalagi dalam menjalankan tugas supervisorynya, kepala

sekolah dan pengawas tidak disertai dengan instrument yang jelas dan terukur untuk mengetahui kinerja guru (Wawancara, 29 Juli 2010).

Motivasi Guru Bersertifikasi

Terkait dengan motivasi guru bersertifikasi, Hisyam mengungkapkan “*beda-ne opo, podo wae, yo mung bedane duwike tambah akeh*”. Tanpa beban, kalimat itu diucapkan oleh sumber yang termasuk guru bersertifikasi (Wawancara, 23 Juli 2010). Sementara Mulyani, menyatakan berbeda dimana para guru bersertifikasi memiliki motivasi yang lebih baik, terutama di swasta karena secara psikologis mereka khawatir jabatannya sebagai guru terlepas, mengingat mencari lahan mengajar tidaklah mudah. Aktualisasinya mereka berusaha memperkuat profesinya melalui kepemilikan alat-alat pendukung pembelajaran, seperti laptop, media atau alat-alat pembelajaran lainnya. Sedangkan guru PNS yang bersertifikasi sedikit berbeda, dimana motivasinya tidak terlalu nampak, terlebih mereka yang telah berusia 50 tahun ke atas, cenderung konvensional, tradisional, tidak ada perubahan yang signifikan dari sebelumnya. (Mulyani, 01 Agustus 2010).

Meskipun demikian, beberapa yang dapat dicatat sebagai motivasi guru bersertifikasi antara lain : (1) semangat hadir; (2) keinginannya untuk belajar TIK dan mencari tambahan informasi melalui internet; (3) lebih rajin; (4) melengkapi perangkat pembelajaran; (5) semangat melaksanakan tupoksi di luar jam kerja; (Sumber: Mulyadi, 27 Juli 2010) (6) studi lanjut ke S2; (7) orientasi pembelajaran pendekatan PIKEM; (8) penggunaan IT untuk pembelajaran dan sebagainya ((Hastomo, 2 Agustus 2010). Sekalipun demikian, juga tidak dapat dipungkiri masih adanya konotasi sebaliknya dimana sertifikasi guru identik dengan peningkatan kesejahteraan guru, sekaligus pemenuhan kebutuhan konsumtif, seperti membeli mobil, merehab rumah, dan kebutuhan lain yang tidak mendukung pada profesionalitas dirinya. (Ari, 27 Juli 2010).

PEMBAHASAN

Kompetensi Guru Bersertifikasi

Sebagaimana paparan hasil penelitian di atas, bahwa terdapat perbedaan terkait kompetensi personal dan paedagogik antara guru dari sekolah-sekolah unggulan dengan guru pada sekolah konvensional. Sementara untuk kompetensi profesional dan sosial meskipun terdapat perbedaan tetapi tidak terlalu signifikan. Mengkaitkan temuan ini dengan data pendukung lainnya, diperoleh informasi bahwa para guru dari sekolah unggulan terkondisikan oleh satuan pendidikannya untuk menjalankan fungsi dan mengembangkan kompetensinya dengan baik. Hal ini berbeda dengan kondisi para guru dari sekolah konvensional, dengan irama kerja rutinitas dan berbagai keterbatasan lainnya, seperti: kurangnya sarana prasarana sekolah, minimnya kesejahteraan guru, keterbatasan kompetensi kepala sekolah, dan iklim sekolah pada umumnya yang kurang kondusif, menjadi penyebab bagi para guru pada sekolah konvensional sehingga tidak mampu meningkatkan kompetensi dengan baik.

Mutu Lulusan dan Guru Bersertifikasi

Mutu lulusan pada dasarnya tidak dapat diukur hanya dari hasil ujian nasional belaka, melainkan harus dilihat dari perubahan antara input, proses, dan output. Disamping itu perubahan secara terintegrasi antara kognisi, affeksi dan psikomotorik menjadi ukuran dari pencapaian mutu dimaksud. Sertifikasi guru secara tidak langsung dapat mendongkrak mutu lulusan. Berbagai kewajiban yang melekat pada guru yang bersertifikasi mulai kewajiban mengajar 24 jam/minggu termasuk pengukuran atas kinerja guru bersertifikasi, diasumsikan secara tidak langsung dapat meningkatkan mutu lulusan sekolah. Dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional menegaskan bahwa paradigma mutu pada dasarnya mencakup *input*, proses, dan *output* pendidikan (Depdiknas, 2001).

Upaya Pemerintah dan Kompetensi Guru

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi guru dilakukan melalui usaha-usaha: (1) pengembangan potensi guru; (2) penyelenggaraan pelatihan, lokakarya, seminar, workshop, dan lainnya; (3) melengkapi sarana dan prasarana belajar; (4) memberikan rewards bagi guru yang berprestasi; (5) meningkatkan kesejahteraan guru; (6) fasilitasi pertemuan secara berkelanjutan sebagai media berbagi pengetahuan; (7) studi banding; (8) studi pustaka; (9) magang ke sekolah lain; (10) mengundang pakar, praktisi, birokrasi, (11) kajian untuk perbaikan dan/atau kualitas pembelajaran; dan (12) studi lanjut guru. Lepas dari upaya tersebut yang terpenting dalam hal ini adalah rencana tindak lanjut (RTL) nya, karena berbagai proses pembinaan seringkali bersifat formal administratif.

Dukungan Sekolah-Stakeholders dan Kompetensi Guru

Dukungan kepala sekolah dan *stakeholders* terutama pengawas dalam peningkatan kompetensi guru bersertifikasi terus diupayakan, seperti pengawasan tentang perangkat pembelajaran, pelaksanaan tugas mengajar guru, menilai kinerja guru, kedisiplinan dan lainnya. Fenomenanya, program sertifikasi guru dimaksud memang telah mendorong berbagai pihak mulai dari sekolah, masyarakat, pemerintah dan stakeholders yang lain untuk berperan dalam mendukung peningkatan kompetensi guru. Masalahnya terletak pada komitmen guru itu sendiri serta tindak lanjut dari berbagai upaya dimaksud.

Sementara itu pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang terhadap guru bersertifikasi, meskipun masih bersifat formal administratif. Disamping problem penguasaan materi oleh pengawas, ketiadaan instrumen yang terukur, komitmen banyak pihak juga perlu ditingkatkan sehingga diperoleh bahan masukan yang berharga untuk perbaikan kebijakan maupun agenda yang ada.

Motivasi Guru Bersertifikasi

Program sertifikasi pada umumnya mampu meningkatkan komitmen dan motivasi guru, beberapa bentuk aktualisasinya antara lain ditunjukkan melalui : (1) penyusunan perangkat pembelajaran yang lebih baik; (2) kehadiran di kelas yang lebih baik; (3) pembaharuan metodologi pembelajaran; (4) melengkapi perangkat pembelajaran pribadi berbasis IT; (5) melengkapi alat-alat pembelajaran berbasis permainan lainnya; dan (6) meningkatkan kualifikasi pendidikannya ke program S2. Meskipun para guru PNS yang berusia 50 tahun ke atas, cenderung konvensional, tradisional, tidak ada perubahan dari sebelumnya. Disamping itu juga ditemukan realitas lain berupa fenomena perilaku konsumtif, seperti membeli mobil, merehab rumah, dan kebutuhan lain yang tidak mendukung pada profesionalitas dirinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mulai dari penyajian data, temuan data di lapangan, analisis yang dilakukan, maka hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, kompetensi dasar (personal, pedagogik, profesional, sosial) para guru bersertifikasi dari sekolah unggulan relatif lebih baik dibandingkan guru-guru dari sekolah konvensional. Perbedaan itu dipengaruhi oleh faktor SDM guru dan kondisi sekolah. *Kedua*, sertifikasi guru tidak secara otomatis dapat meningkatkan mutu lulusan, akan tetapi diyakini secara tidak langsung dan bertahap dapat meningkatkan mutu lulusan. *Ketiga*, upaya pemerintah terkait peningkatan kompetensi guru tersertifikasi belum terencana dengan baik, karena masih bersifat administratif. *Keempat*, monitoring dan evaluasi atas guru bersertifikasi belum berjalan efektif dan optimal. *Kelima*, dukungan sekolah dan stakeholder terhadap optimalisasi guru tersertifikasi secara umum belum maksimal. *Keenam*, motivasi guru bersertifikasi masih bersifat eksternal dan belum menjadi kesadaran pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhammad, 2002, *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru, Algensindo Offset.
- Azra, Azumardi, (2002), *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Jakarta: Kompas
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2008: Buku 6 Pedoman Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur pendidikan*, Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas, Jakarta.
- Depdiknas, 2000, *Panduan manajemen Sekolah*, Dikmenum, Jakarta.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, (2001), Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP, *Pengantar Program Latihan*, Surabaya.
- Faisal, Sanapiah, (1990), *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: Y A3
- Irfan, Moh, (2000), *Pedoman Pembinaan Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah*, Jakarta : Departemen Agama RI.
- Moleong, Lexy J., (1994) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Republik Indonesia, 2003, *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: CV Tamita Utama.
- Samani, Muchlas, (1999), *Panduan Manajemen Sekolah*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Jakarta.

- Siagian, Sondang P., (1988), *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta: Bina Aksara
- Siagian, Sondang P, 1997, *Teori dan Praktek kepemimpinan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Usman, Uzer, 2000, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zid, Muhammad, 2008, *Kompetensi dan Jabatan Profesional Guru Geografi*, Makalan disampaikan dalam seminar nasional *Pertemuan Ilmiah Tahunan VIII, Kongres Nasional III Ikatan Geograf Indonesia & Expo Teknologi Informasi Spasial*, Depertemen Geografi FMIPA UI, Depok 14-15 September 2006, www.scansoft.com, diakses tanggal 20 Pebruari 2010